

TESIS

**Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Organisasi Ikatan Notaris
Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah terhadap Honorarium Notaris di
Kota Pekanbaru**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan*

Dicky Andika

2220122006



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S. H., M. Pd

Dr. Syofirman Syofyan, SH., MH

PROGRAM MEGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2023/2024

**Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Organisasi Ikatan
Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah terhadap
Honorarium Notaris di Kota Pekanbaru**

Dicky Andika, 2220122006, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Andalas, Tahun 2024.

ABSTRAK

Dewan Kehormatan Daerah yang mewakili Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Daerah sebagai badan yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap notaris-notaris di Indonesia tentu saja memiliki peran dan fungsi sangat penting guna mencegah pelanggaran dan menegakkan kode etik terhadap penyimpangan penetapan honorarium yang dilakukan oknum notaris jika perannya dilaksanakan maka penyimpangan dalam penetapan honorarium tentu dapat di minimalisir namun sering adanya pelanggaran terhadap honorarium ini. Menunjukkan masih adanya hal yang harus dibenahi oleh Dewan Kehormatan Daerah kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan *pertama* untuk mengetahui Penetapan Tarif Yang Dilakukan Oleh Para Notaris di Kota Pekanbaru, *kedua* untuk mengetahui pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan penetapan honorarium *ketiga* untuk mengetahui Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pengaturan penetapan honorarium yang dilakukan oleh para Notaris di Kota Pekanbaru Pengurus Daerah Notaris Kota Pekanbaru mengadakan rapat anggota dan ditetapkan secara tertulis. Namun demikian dari hasil yang mereka sepakati masih ada saja oknum Notaris yang melanggar kesepakatan yang disepakati bersama. Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium yang disepakati perkumpulan belum pernah ada pengaduan dan dilakukan pengawasan maupun pemeriksaan Pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan yang bersifat represif, pengawasan yang bersifat preventif kurang dilakukan. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium di Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran penetapan honorarium yang disepakati oleh para Notaris. Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru tidak mempunyai daftar harga penetapan harga honorarium yang ditetapkan perkumpulan tersebut. Sedangkan di dalam pasal 4 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menetapkan harga honorarium dibawah harga yang ditetapkan perkumpulan. Sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi Notaris karena tidak memiliki daftar harga yang ditetapkan perkumpulan notaris di Kota Pekanbaru tersebut.

Kata Kunci : *Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Daerah, Honorarium*

**Supervision by the Regional Honorary Council of the Indonesian
Notary Association Organization and the Regional Supervisory
Council of Notary Honorariums in Pekanbaru City**

**Dicky Andika, 2220122006, Master of Notary, Faculty of Law,
Andalas University, 2024.**

ABSTRACT

The Regional Honorary Council which represents the Indonesian Notary Association (INI) and the Regional Supervisory Council as a body that has the function of supervising notaries in Indonesia of course has a very important role and function in preventing violations and enforcing a code of ethics against irregularities in honorarium determination by unscrupulous individuals. If the notary's role is carried out, deviations in determining the honorarium can certainly be minimized, but there are often violations of this honorarium. Shows that there are still things that must be addressed by the Pekanbaru City Regional Honorary Council. This research aims firstly to find out the rate determination carried out by Notaries in Pekanbaru City, secondly to find out the supervision by the Pekanbaru City Regional Notary Honorary Council regarding irregularities in determining honorariums thirdly to find out the role of the Pekanbaru City Regional Supervisory Council (MPD) regarding honorarium deviations. This research method is empirical juridical legal research. Arrangements for determining honorariums carried out by Notaries in Pekanbaru City. The Regional Management of Pekanbaru City Notaries holds a member meeting and determines it in writing. However, from the results they agreed on, there were still Notary elements who violated the mutually agreed agreement. There have never been any complaints by the Pekanbaru City Regional Notary's Honorary Council regarding irregularities in the honorarium agreed upon by the association and supervision or inspections have been carried out. The supervision carried out is only repressive supervision, preventive supervision is not carried out. The role of the Pekanbaru City Regional Notary Supervisory Council regarding irregularities in honorariums in Pekanbaru City has never been to supervise violations of honorarium determinations agreed upon by Notaries. The Pekanbaru City Regional Supervisory Council does not have a price list for determining honorarium prices determined by the association. Meanwhile, article 4 of the Notary Code of Ethics states that notaries are prohibited from setting honorarium prices below the price set by the association. So there is no basis for the Regional Supervisory Council to supervise Notaries because they do not have a price list set by the notary association in Pekanbaru City.

Keywords: Regional Honorary Council, Regional Supervisory Council, Honorarium.